

# RUU Perampasan Aset

▲ 200 ancaman sistemik

💀 Analisis lengkap 200 bahaya Fungsi Kedua (In Rem) — dari hukum, ekonomi, sosial, HAM, geopolitik, hingga peradaban.

## Memahami Dua Fungsi Perampasan Aset

Banyak orang keliru menganggap semua perampasan aset itu sama. Padahal, ada **dua mekanisme yang sangat berbeda**—satu sudah lama berjalan, satu lagi sedang diusulkan dan **sangat berbahaya**. Berikut perbandingannya:

## ✓ Fungsi 1

✓ SUDAH ADA

➔ In Personam — Berdasarkan Vonis

**Apa itu?** Perampasan aset yang dilakukan **setelah** seseorang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht).

✓ **Subjek:** Menyeret **orangnya** — harus ada  
(pelaku) tersangka/terdakwa yang jelas.

✓ **Bukti:** Harus "terbukti secara sah dan meyakinkan" bahwa pelaku bersalah.

✓ **Waktu:** Dieksekusi **SETELAH** vonis hakim berkekuatan tetap.

✓ **Tujuan:** Menghukum *punitif* ) dan mengembalikan pelaku ( kerugian negara.

🛡 **Keamanan:** Mekanisme ini sudah terikat ketat oleh KUHAP dan putusan hakim—**risiko penyalahgunaannya relatif kecil.**

📌 **Contoh:** Aset terpidana korupsi yang disita dan dilelang negara setelah vonis.

## ! Fungsi 2

! RUU BARU

💀 In Rem — Tanpa Vonis

**Apa itu?** Perampasan aset yang dilakukan **sebelum** pemiliknya dinyatakan bersalah—bahkan tanpa kehadiran tersangka (misal pelaku kabur atau meninggal).

- ✖ **Subjek:** Menyeret **hartanya** —negara bisa menyita (**barangnya**) meskipun pemilik tidak diketahui.
- ✖ **Bukti:** Cukup "**bukti**" atau indikasi kuat (harta tak dengan **permulaan**" sebanding penghasilan).
- ✖ **Waktu:** Dieksekusi **SEBELUM** atau **SELAMA** proses hukum berjalan—sejak tahap penyelidikan.
- ✖ **Tujuan:** Mencegah pelaku (*asset*) dan memiskinkan memindahkan aset (*hiding* jaringan kejahatan).

💀 **Bahaya:** Negara menyita dulu, **baru** pemiliknya yang harus membuktikan hartanya halal (beban pembuktian terbalik). Ini **melanggar praduga tak bersalah**.

! **Risiko:** **Senjata politik, kriminalisasi, dan penyalahgunaan wewenang**—inilah 200 ancaman di bawah!

| Aspek Perbandingan        | Fungsi 1 (In Personam) – SUDAH ADA      | Fungsi 2 (In Rem) – RUU BARU                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Subjek sasaran            | Pelaku kejahatan (terdakwa)             | Harta benda (tanpa perlu ada pelaku)                                  |
| Beban pembuktian          | Negara membuktikan kesalahan pelaku     | Pemilik harta membuktikan hartanya halal                              |
| Waktu eksekusi            | Setelah putusan hakim berkekuatan tetap | Sejak tahap penyelidikan (sebelum vonis)                              |
| Keterlibatan pihak ketiga | Terbatas pada terdakwa                  | Istri, anak, kreditur, mitra usaha ikut terdampak                     |
| Risiko penyalahgunaan     | Rendah (terikat KUHAP)                  | <b>SANGAT TINGGI</b> – berpotensi menjadi senjata politik dan ekonomi |

“**Kesimpulan awal:** Fungsi 1 sudah terbukti aman dan berjalan puluhan tahun. Fungsi 2 adalah lompatan berbahaya yang mengancam kebebasan sipil dan fondasi negara hukum. 200 ancaman di bawah ini adalah bukti mengapa Fungsi 2 harus ditolak!



Fungsi 2 secara frontal menabrak sendi-sendi konstitusi dan prinsip universal negara hukum. Berikut 30 ancaman di bidang ini:

1. Menghancurkan asas **praduga tak bersalah** (UUD 1945 Pasal 28D ayat 1)
2. Melanggar **hak milik pribadi** (Pasal 28H ayat 4)
3. Mengingkari asas **ne bis in idem** (tidak boleh dua kali diadili)
4. Menghilangkan **kepastian hukum** (*rechtszekerheid*)
5. Merusak sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)
6. Menggeser kekuasaan kehakiman dari yudikatif ke eksekutif (penyitaan sebelum putusan hakim)
7. Melanggar asas **due process of law**
8. Menghancurkan asas **audi et alteram partem** (hak didengar pihak lain)
9. Mengabaikan asas **equality before the law** (persamaan di depan hukum)
10. Membuka celah **penyalahgunaan wewenang** oleh aparat penegak hukum
11. Menghilangkan fungsi kontrol horizontal antar-lembaga negara
12. Melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi
13. Mengancam **independensi hakim** dalam memutus perkara
14. Menciptakan dualisme putusan yang saling bertentangan (pidana vs perampasan aset)
15. Menghilangkan asas **actori incumbit probatio** (beban pembuktian pada penggugat)
16. Melanggar asas **nemo tenetur se ipsum accusare** (hak tidak memberatkan diri)
17. Menghancurkan asas **ultimum remedium** (hukum pidana sebagai upaya terakhir)
18. Mengabaikan asas **lex retro non agit** (UU tidak berlaku surut)
19. Melanggar asas **nullum delictum nulla poena sine praevia lege**
20. Menghilangkan asas **non bis in idem** dalam konteks perampasan berganda
21. Mengancam prinsip **trias politica** (pemisahan kekuasaan)
22. Melemahkan fungsi legislatif DPR dalam mengawasi eksekutif
23. Mengancam **kedaulatan rakyat** sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
24. Menghilangkan hak warga negara untuk menggugat negara (*actio popularis*)
25. Mengancam prinsip **rechtsstaat** (negara hukum) yang dianut Indonesia
26. Menggeser dari **negara hukum** menjadi **negara kekuasaan** (*machtsstaat*)
27. Menghancurkan **supremasi hukum** yang menjadi cita-cita reformasi
28. Menghilangkan rasa aman dan perlindungan negara terhadap warga negaranya
29. Mengancam kestabilan politik nasional
30. Membuka pintu bagi **rezim otoritarian** di masa depan

➦ **Inti bahaya:** RUU ini mengubah relasi negara-rakyat—dari pelindung menjadi pengintai. Setiap warga negara dianggap bersalah sampai ia membuktikan kesuciannya.

Dampak ekonomi dari RUU ini menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional. Investor kabur, UMKM mati, rakyat kehilangan pekerjaan.

31. Menyebabkan **capital flight** (pelarian modal) besar-besaran
32. Menurunkan peringkat **kemudahan berbisnis** (EoDB) Indonesia
33. Mengusir **investor asing** yang sudah menanamkan modal
34. Menghambat masuknya **investasi asing baru** (FDI)
35. Menghancurkan iklim **UMKM** dan ekonomi kerakyatan
36. Mematikan sektor **startup dan ekonomi digital**
37. Menyebabkan penutupan perusahaan dan **PHK massal**
38. Menurunkan nilai tukar **rupiah** akibat capital flight
39. Meningkatkan harga barang impor karena rupiah melemah
40. Menghancurkan sektor **properti dan perumahan**
41. Mengancam sektor **perbankan nasional** (rush dan kredit macet)
42. Merusak sistem **pembiayaan dan kredit** perbankan
43. Mengancam stabilitas **pasar modal** Indonesia (BEI)
44. Menurunkan **peringkat utang** Indonesia (credit rating)
45. Meningkatkan **biaya utang luar negeri** pemerintah
46. Menghancurkan sektor **pariwisata dan perhotelan**
47. Mengancam sektor **pertanian dan perkebunan rakyat**
48. Mematikan sektor **perikanan dan kelautan**
49. Mengancam sektor **pertambangan dan energi**
50. Menghancurkan sektor **industri manufaktur**
51. Mematikan sektor **perdagangan dan distribusi**
52. Mengancam sektor **logistik dan transportasi**
53. Menghancurkan sektor **konstruksi dan infrastruktur**
54. Mengancam sektor **pendidikan swasta**
55. Mematikan sektor **kesehatan swasta**
56. Mengancam sektor **media dan periklanan**
57. Menghancurkan sektor **seni dan budaya**
58. Mengancam sektor **olahraga dan hiburan**
59. Menyebabkan **brain drain** (kaburnya talenta terbaik)
60. Menurunkan **pertumbuhan ekonomi nasional** secara signifikan



### Capital Flight

Pengusaha memindahkan harta ke luar negeri karena takut disita.



### UMKM Gulung Tikar

UMKM yang menerima pinjaman dari pihak 'tercurigai' ikut kehilangan aset.



### PHK Massal

Perusahaan yang asetnya dibekukan menghentikan operasi—ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.



- 61. Menciptakan budaya **saling curiga** (social distrust)
- 62. Menghancurkan **gotong royong** dan solidaritas sosial
- 63. Memicu **konflik horizontal** antar-warga
- 64. Menciptakan **stigma sosial** terhadap korban penyitaan
- 65. Menghancurkan **keharmonisan rumah tangga** dan keluarga
- 66. Meningkatkan angka **perceraian** akibat konflik harta
- 67. Mengancam **kesejahteraan anak-anak** korban
- 68. Menciptakan **generasi traumatis** yang membenci negara
- 69. Meningkatkan angka **depresi, stres, dan bunuh diri**
- 70. Menghancurkan **kesehatan mental** masyarakat
- 71. Menciptakan jurang **ketimpangan sosial** yang semakin lebar
- 72. Memiskinkan **masyarakat miskin** yang sudah miskin
- 73. Menghancurkan **kelas menengah** Indonesia
- 74. Mengancam hak **perempuan** atas harta bersama
- 75. Mengancam hak **anak** atas warisan dan masa depan
- 76. Mengancam hak **penyandang disabilitas**
- 77. Menghancurkan hak **lansia** atas pensiun dan jaminan hari tua
- 78. Mengancam hak **buruh** atas pesangon dan jaminan sosial
- 79. Menghancurkan hak **masyarakat adat** atas tanah ulayat
- 80. Mengancam akses **pendidikan**
- 81. Mengancam akses **kesehatan**
- 82. Menghancurkan akses **pekerjaan**
- 83. Mengancam akses **pangan**
- 84. Mengancam akses **perumahan**
- 85. Menciptakan **class war** (perang kelas)
- 86. Menghancurkan **modal sosial** (social capital)
- 87. Menciptakan masyarakat **apatid dan pasrah**
- 88. Mengancam nilai-nilai **Pancasila** dalam kehidupan sosial
- 89. Menghancurkan **kerukunan umat beragama**
- 90. Mengancam **persatuan dan kesatuan NKRI**

♥ **Korban paling rentan:** anak-anak, istri yang tidak tahu menahu, ahli waris, dan masyarakat miskin yang tidak punya akses ke jalur hukum.



91. Melanggar **Hak Asasi Manusia** (HAM) yang dijamin konstitusi
92. Melanggar **Deklarasi Universal HAM** Pasal 17 (hak milik)
93. Melanggar **Kovenan Internasional** tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
94. Melanggar **Konvensi Eropa** tentang HAM (standar universal)
95. Menghancurkan hak atas **privasi** dan kerahasiaan data keuangan
96. Mengancam hak atas **kebebasan bergerak** (pencekalan)
97. Mengancam hak atas **kebebasan berpendapat** dan berekspresi
98. Mengancam hak atas **kebebasan berkumpul** dan berserikat
99. Mengancam hak atas **kebebasan beragama** dan berkeyakinan
100. Menghancurkan hak atas **peradilan yang adil** dan tidak memihak
101. Melanggar hak untuk mendapatkan **bantuan hukum**
102. Melanggar hak untuk **diperlakukan sama** di depan hukum
103. Melanggar hak untuk **tidak ditangkap** tanpa alasan sah
104. Melanggar hak untuk **tidak disiksa** (secara psikologis)
105. Melanggar hak atas **pengakuan sebagai pribadi** di depan hukum
106. Melanggar hak atas **perlindungan hukum** dari tindakan sewenang-wenang
107. Melanggar hak atas **ganti rugi** jika terjadi kesalahan hukum
108. Melanggar hak atas **kehidupan pribadi** dan keluarga
109. Melanggar hak atas **kehormatan dan nama baik**
110. Melanggar hak untuk **bebas dari ketakutan** (freedom from fear)
111. Melanggar hak untuk **bebas dari kemiskinan** (freedom from want)
112. Melanggar hak atas **standar kehidupan** yang layak
113. Melanggar hak atas **perumahan** yang layak
114. Melanggar hak atas **makanan** yang cukup
115. Melanggar hak atas **air bersih** dan sanitasi
116. Melanggar hak atas **kesehatan** fisik dan mental
117. Melanggar hak atas **pendidikan dasar**
118. Melanggar hak atas **pekerjaan** dan penghidupan yang layak
119. Melanggar hak atas **jaminan sosial** di hari tua
120. Melanggar hak untuk **mewariskan harta** kepada ahli waris



121. Dicoretnya Indonesia dari **FATF** (Financial Action Task Force)
122. Dikenai **sanksi ekonomi** oleh Uni Eropa dan AS
123. Menurunnya peringkat Indonesia dalam **indeks demokrasi**
124. Menurunnya peringkat Indonesia dalam **indeks HAM**
125. Menurunnya peringkat Indonesia dalam **indeks persepsi korupsi**
126. Menurunnya peringkat Indonesia dalam **indeks kebebasan sipil**
127. Menurunnya peringkat Indonesia dalam **indeks supremasi hukum**
128. Ditinggalkannya Indonesia oleh **perusahaan multinasional**
129. Ditinggalkannya Indonesia oleh **lembaga keuangan internasional**
130. Ditolaknya **kerja sama ekstradisi** dengan negara lain
131. Ditutupnya akses Indonesia ke **pasar modal global**
132. Meningkatnya **biaya pinjaman luar negeri** Indonesia
133. Menurunnya nilai **obligasi pemerintah** Indonesia (SUN)
134. Melemahnya **posisi tawar** Indonesia di forum internasional
135. Hilangnya **kepercayaan** negara tetangga terhadap sistem hukum Indonesia
136. Mengancam **kerja sama bilateral** dengan Singapura
137. Mengancam **kerja sama bilateral** dengan Malaysia
138. Mengancam **kerja sama bilateral** dengan Australia
139. Mengancam **kerja sama bilateral** dengan China dan AS
140. Mengisolasi Indonesia secara **diplomatik**
141. Mengancam posisi Indonesia di **ASEAN**
142. Mengancam posisi Indonesia di **G20**
143. Mengancam posisi Indonesia di **PBB**
144. Menurunkan citra Indonesia sebagai **negara demokrasi terbesar ketiga**
145. Mengancam peran Indonesia sebagai **pemimpin negara berkembang**
146. Menghancurkan reputasi Indonesia sebagai **negara moderat**
147. Mengancam program **hilirisasi industri nasional**
148. Mengancam target ekonomi Indonesia menjadi **negara maju 2045**
149. Menghancurkan visi **Indonesia Emas 2045**
150. Mengancam **kedaulatan ekonomi** Indonesia secara keseluruhan

151. Melanggar nilai **Ketuhanan Yang Maha Esa** (Sila Pertama)
152. Melanggar nilai **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** (Sila Kedua)
153. Melanggar nilai **Persatuan Indonesia** (Sila Ketiga)
154. Melanggar nilai **Kerakyatan** (Sila Keempat)
155. Melanggar nilai **Keadilan Sosial** bagi Seluruh Rakyat (Sila Kelima)
156. Mengkhianati amanat **Pembukaan UUD 1945** tentang kemerdekaan dan keadilan
157. Menghancurkan **hak asasi manusia** sebagai anugerah Tuhan
158. Mengancam **iman** masyarakat terhadap keadilan ilahi
159. Menghancurkan nilai-nilai agama tentang **kepemilikan** yang sah
160. Mengancam nilai-nilai agama tentang **sedekah, infak, dan zakat**
161. Mengancam nilai-nilai agama tentang **warisan** dan hak ahli waris
162. Menghancurkan nilai-nilai agama tentang **kejujuran dan amanah**
163. Mengancam **tempat ibadah** yang dibangun dari sumbangan jamaah
164. Mengancam **yayasan keagamaan** dan lembaga dakwah
165. Mengancam **pondok pesantren** dan madrasah
166. Mengancam **lembaga zakat dan wakaf**
167. Menghancurkan nilai-nilai luhur **budaya bangsa**
168. Mengancam filosofi **simbiosis mutualisme** dalam budaya Indonesia
169. Menghancurkan nilai **gotong royong** yang menjadi ciri bangsa
170. Mengancam nilai **musyawarah mufakat** dalam pengambilan keputusan
171. Menghancurkan nilai **toleransi** dan kerukunan antar-umat beragama
172. Mengancam nilai **kekeluargaan** dalam bermasyarakat
173. Menghancurkan nilai **keadilan sosial** yang menjadi cita-cita proklamasi
174. Mengancam nilai **persatuan dan kesatuan** bangsa
175. Menghancurkan nilai **kebhinekaan** sebagai kekuatan bangsa
176. Mengancam nilai **demokrasi** yang telah diperjuangkan reformasi
177. Menghancurkan nilai **supremasi hukum** sebagai tonggak reformasi
178. Mengancam nilai **hak asasi manusia** sebagai pilar reformasi
179. Menghancurkan nilai **antikorupsi** yang menjadi dalih RUU ini
180. Mengancam masa depan **spiritual dan moral** bangsa

■ **Pesan moral:** "Sebuah bangsa yang mengorbankan kebebasan dan keadilan demi keamanan, pada akhirnya akan kehilangan keduanya."



# 10 Ancaman Paling Mematikan

INTI

Dari 200 ancaman, berikut 10 yang paling fundamental dan berbahaya bagi bangsa:

| #  | Ancaman                           | Dampak Langsung                                       |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Penghancuran praduga tak bersalah | Setiap orang dianggap bersalah sampai terbukti halal  |
| 2  | Senjata politik                   | Lawan politik bisa ditunggangi melalui penyitaan aset |
| 3  | Beban pembuktian terbalik         | Rakyat kecil dipaksa melawan mesin negara             |
| 4  | Penyitaan tanpa vonis             | Harta diambil sebelum pengadilan memutus              |
| 5  | Capital flight                    | Pengusaha kabur, ekonomi hancur                       |
| 6  | PHK massal                        | Perusahaan yang disita memecat ribuan karyawan        |
| 7  | Kerugian pihak ketiga             | Istri, anak, kreditur, dan mitra usaha ikut korban    |
| 8  | Rusaknya iklim investasi          | Investor asing hengkang                               |
| 9  | Sanksi internasional              | Indonesia dicoret dari FATF dan forum global          |
| 10 | Keruntuhan peradaban              | Keadilan mati, bangsa hancur                          |

## ⚠ Seruan Akhir

Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa—DPR, pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil—untuk **menolak RUU ini** dalam bentuknya yang sekarang. Tuntutlah **amandemen superketat** yang menjamin independensi peradilan, mekanisme ganti rugi yang jelas, batasan waktu penyitaan, dan pengawasan publik yang kuat. Jangan biarkan **200 ancaman sistemik** ini menjadi kenyataan. Karena jika keadilan mati, maka runtuhlah peradaban kita.



## 200 Ancaman Sistemik — RUU Perampasan Aset

Dokumen ini disusun sebagai bahan refleksi dan advokasi publik. Semoga menjadi pengingat bahwa **hukum yang baik adalah hukum yang melindungi, bukan menakuti.**

“Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat—maka bangsa telah kehilangan jati dirinya.”